



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: [2477-8524](#)(Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Analisis sektor-sektor basis dan non basis perekonomian wilayah Kabupaten Banggai tahun 2014-2018

Andi Herman Jaya<sup>\*)</sup>

Fakultas Dan Bisnis Ekonomi Universitas Tadulako, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Feb 24<sup>th</sup>, 2022

Revised Mar 14<sup>th</sup>, 2022

Accepted Jun 22<sup>nd</sup>, 2022

#### Keyword:

Sektor-sektor basis,  
Sektor-sektor non basis,  
Location quotient

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor apa saja yang ada di wilayah Banggai yang bersifat basic dan non-basi serta mengidentifikasi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Banggai. Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Banggai digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Banggai yang menjadi pemacu pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan selama periode pengamatan 2014 hingga 2018, hasil analisis location-quantity (LQ) PDRB di Kabupaten Banggai dapat mengidentifikasi sektor dan off-base. Industri pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB di Bangui, menjadikan sektor ini sebagai sektor fundamental. Rata-rata LQ sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,46 yang menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan yang baik sehingga cukup berpengaruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Banggai.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Andi Herman Jaya,  
Universitas Tadulako  
Email: [andiherman06@gmail.com](mailto:andiherman06@gmail.com)

## Pendahuluan

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Di sisi lain, tidak ada kebutuhan untuk bantuan. Perkembangan setiap daerah berusaha member dampak beban pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses jangka panjang dari peningkatan pendapatan per kapita. Penentu utama pertumbuhan ekonomi adalah permintaan barang dan jasa ekstra-regional, yang memungkinkan sumber daya lokal menciptakan lapangan kerja regional sekaligus menciptakan kekayaan regional. Artinya sumber daya lokal termasuk sumber daya alam dan manusia memang sangat strategis penting dalam perekonomian suatu negara.

Potensi daerah adalah kerangka pembangunan yang diartikan sebagai kemampuan, kekuatan, dan kapasitas ekonomi suatu daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia. Mirip dengan potensi geografis yang diusulkan. dan infrastruktur pendukung lainnya. Tantangan kompetitif yang mempengaruhi perekonomian daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah dimaknai sebagai pedoman peningkatan daya saing daerah berbagai daerah di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan kemandirian masing-masing daerah, maka penting untuk mengoptimalkan potensi masing-masing daerah. Kemandirian

dapat diartikan sebagai pengurangan ketergantungan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, daerah lain atau negara lain.

Menurut (Yusuf, 2021), Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat setempat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang ada harus dapat mengestimasi potensi sumber daya yang dibutuhkan untuk perancangan dan pengembangan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 1999: 108). Pembangunan ekonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Kabupaten Banggai merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu daerah otonom yang diberdayakan untuk mengatur pemerintahan dan mengembangkan serta melayani masyarakat, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan, dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi seluruh masyarakat di Kabupaten Banggai. PDRB Kabupaten Banggai rata-rata Rp per bisnis dari 2014 hingga 2018 berdasarkan harga konstan 2010 14.341.648.00.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai sangat dipengaruhi oleh industri pertambangan dan penggalian yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 68,60% dari tahun 2014 hingga 2018. Disusul oleh industri informasi dan komunikasi, dengan pertumbuhan rata-rata 11,80% dari 2014 hingga 2018. Kemudian sektor pembelian listrik dan gas tumbuh rata-rata 10,65% dari tahun 2014 hingga 2018.

Hasil yang diharapkan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik akan meningkatkan kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, menurut (Arsyad, 1999: 40), harus diakui bahwa pembangunan ekonomi adalah proses dimana masyarakat menciptakan lingkungan fisik atau peraturan (sikap) yang mempengaruhi hasil pembangunan ekonomi, seperti peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menggunakan sumber daya pembangunan utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu, Arsyad menyatakan bahwa ada tiga sumber utama pembangunan bagi terselenggaranya proses pembangunan daerah, yaitu:

#### **Lingkungan fisik sebagai sumber daya penerimaan.**

Pemerintah daerah umumnya memperhatikan aspek lingkungan dari infrastruktur fisik, yang tentu saja penting untuk bisnis dan industri. Sektor swasta seringkali memiliki aspirasi khusus dan umum serta persyaratan khusus untuk lingkungan fisik. Kebutuhan khusus sering kali mencakup transportasi khusus atau jasa konstruksi limbah. Dalam banyak kasus, bentuk lingkungan fisik ini sering memberikan layanan atau fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau industri. Salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi investasi swasta adalah daya tarik kawasan. Bentuk daya tarik ini sering disebut sebagai kualitas hidup. Bisnis melihat tanggung jawab sebagai faktor lokasi yang penting, dan pemerintah daerah berada pada posisi terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup lokal.

#### **Lingkungan regulasi sebagai sumberdaya perencanaan.**

Kita semua memahami bahwa insentif penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah daerah saat ini meninjau sistem untuk menunjukkan bahwa biaya melakukan bisnis di daerah yang mereka dorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain kawasan, sistem regulasi harus disederhanakan. Sebagai contoh, beberapa kota di negara maju baru-baru ini terletak di pusat layanan terintegrasi.

#### **Lingkungan attitudinal sebagai sumberdaya perencanaan.**

Perluasan atau pengalihan investasi di industri kue swasta tidak semata-mata didasarkan pada penulisan ulang data. Bahkan, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat setempat terhadap lokasi investasi potensial. Ada bidang-bidang tertentu yang biasanya tidak dipilih oleh dunia bisnis karena penduduknya terkenal anti bisnis.

Menurut (Arsyad, 1999: 23), untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber-sumber pembangunan tersebut di atas, paling tidak diperlukan tanggal sebagai berikut: (1) Data Kependudukan. Data kependudukan yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah adalah struktur kependudukan yang berkaitan dengan pekerjaan, umur, pendapatan, dan persebaran

penduduk menurut pekerjaan selama waktu sepuluh tahun. Analisis kependudukan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah karena karakteristik kehidupan komunitas tersebut. (2) Kondisi Pasar Tenaga Kerja. Data kondisi pasar tenaga kerja meliputi informasi distribusi lapangan kerja menurut industri menurut jenis kelamin, serta informasi pengangguran dan setengah pengangguran menurut industri selama lima tahun terakhir. Pola kerja masyarakat akan menunjukkan apakah sumber daya manusia tersedia atau ekonomi perlu dibangun, dan berapa banyak pekerja yang membutuhkan bantuan. (3) Karakteristik Ekonomi. Data ekonomi yang diperlukan meliputi: fundamental ekonomi wilayah, perubahannya dan responnya terhadap perubahan kondisi ekonomi baru, dan kondisi ekonomi masa lalu dan sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ekonomi juga harus diselidiki. Pemahaman yang baik tentang struktur ekonomi merupakan langkah penting dalam merancang rencana pembangunan ekonomi jangka panjang. (4) Data Kondisi fisik. Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi pemeriksaan kondisi fisik dan bentang alam basis ekonominya, termasuk penilaian sumber daya keuangan (pertanian, pertambangan, dll), lahan industri, jaringan transportasi dan komunikasi, ketersediaan barang-barang rumah tangga, ketersediaan aset pariwisata untuk tujuan tersebut. Mendokumentasikan aset dan kewajiban pabrik membantu kami memperkuat keunggulan regional kami.

### **Teori Basis Ekspor (*Export Base Theory*)**

Kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua sektor kegiatan, kegiatan inti dan kegiatan esensial. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) di luar zona ekonomi, sedangkan kegiatan non inti adalah kegiatan lokal yang menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat di dalam zona ekonomi. Bisnis inti adalah mesin utama pertumbuhan regional. Semakin besar ekspor suatu daerah ke daerah lain, maka semakin maju pula pertumbuhan daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. Setiap perubahan pada industri primer memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah (Adisamita, 2005: 28). Industri primer merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki keunggulan kompetitif yang cukup besar. Sektor non-basis, pada gilirannya, merupakan sektor lain yang kurang potensial tetapi mendukung sektor bahan baku atau jasa (Sjafrizal 2008:89). Suatu sektor atau wilayah inti dapat dianalisis menggunakan teknik location quotient (LQ) untuk mengetahui apa spesialisasi sektor inti atau sektor unggulan tersebut. Teknik location quotient (LQ) dapat menggunakan variabel tenaga kerja suatu wilayah atau produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Hasil bagi lokasi adalah jumlah pekerja di sektor tertentu atau rasio total PDB suatu wilayah terhadap rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan wilayah teratas (referensi).

Glasson (1977:65) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah dapat dibedakan dua (dua) sektor, yaitu; (1) Sektor dasar, yaitu kegiatan ekonomi yang mengekspor barang dan jasa di luar batas ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dengan kata lain sektor dasar merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor. (2) Sektor non esensial, yaitu kegiatan yang menyediakan barang kebutuhan bagi masyarakat yang hidup dalam lingkup ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang manufaktur, ruang lingkup produksi dan wilayah pasarnya terutama lokal. Teori ekonomi didasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar wilayah tersebut. Industri yang berkembang yang menggunakan sumber daya lokal untuk ekspor, termasuk tenaga kerja dan bahan mentah, akan menciptakan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan kerja. (Arsjad, 2004: 75). Karena industri primer menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar di dalam dan di luar daerah, penjualan produk ke luar daerah akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Semakin banyak aktivitas dasar yang dimiliki suatu daerah, semakin banyak pendapatan mengalir ke daerah itu. Dengan demikian, kegiatan sektor dasar merupakan penggerak utama perekonomian suatu daerah. Pembangunan ekonomi wilayah lazimnya bergantung kepada kemampuan sesebuah wilayah untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh ekonomi untuk ekonomi negara dan mengekspor barangan dan perkhidmatan yang mempunyai kelebihan daya saing ke wilayah lain (Kadariah 1985: 34). Pengertian perekonomian daerah, ekspor adalah penjualan produk/jasa dari daerah ke daerah lain di dalam negeri atau luar negeri (Tarigan, 2005:23). Arsyad (2004:41) berpendapat bahwa strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan fundamental ekonomi menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada perusahaan dengan pasar domestik dan internasional. Implementasi kebijakan tersebut antara lain mengurangi hambatan atau pembatasan ekspor yang ada – menyasar perusahaan. dan akan didirikan di daerah.

Kemampuan ekspor ini akan menimbulkan aliran pendapatan ke daerah yang pada gilirannya melalui multiplier effect memperluas pasar barang dan jasa yang diproduksi di daerah dan barang dan jasa yang diproduksi di daerah lain. Sektor basis dapat memberikan dampak langsung dan dampak tidak langsung (Sukirno 1976:40). Dampak langsung: (1) Kenaikan ekspor berarti dapat memberikan tambahan untuk mengimpor barang-barang modal yang penting. (2) Pengembangan ekspor berarti mengalokasikan dana

kepada sektor yang paling efisien untuk dapat bersaing. (3) Kegiatan ekspor akan memperluas pasar produksi dalam negeri dan memperluas skala industri. (4) Karena harus bersaing akan mendorong sektor basis untuk mempertinggi efisiensi kegiatan.

Dampak tidak langsung: (1) Adanya ekspor akan mendorong peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. (2) Berkembangnya sektor basis akan mempermudah masuknya teknologi baru. (3) Kemampuan melakukan impor akan memperluas variasi barang dan mendorong pertambahan dalam konsumsi. Selain itu dari sektor basis, pendapatan suatu wilayah juga berasal dari sektor non basis, sehingga pendapatan suatu wilayah merupakan total pendapatan dari sektor basis dan non basis. Identifikasi suatu sektor sebagai sektor basis dapat dilakukan dengan menghitung location quotient (LQ) untuk sektor tersebut. LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor/subsektor primer dan non-primer. Sektor/subsektor primer adalah sektor/subsektor yang mampu mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor/subsektor tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor/subsektor tersebut. sub-industri. -Departemen. - Departemen ke daerah lain.

Teori location quotient (LQ) mengasumsikan bahwa populasi suatu wilayah memiliki pola permintaan yang sama dengan pola permintaan yang ada di tingkat nasional, dan bahwa permintaan wilayah terhadap suatu barang pertama-tama dipenuhi oleh produk wilayah itu sendiri, dan hanya jika permintaan melebihi produksi di daerah. volume, kekurangannya berasal dari impor dari luar daerah. Berdasarkan asumsi ini, jika baik Indonesia maupun Wilayah A dapat memenuhi permintaannya terhadap suatu barang tertentu melalui produksinya sendiri, atau dengan kata lain, baik Indonesia maupun Wilayah A dapat berswasembada terhadap barang tersebut, maka implikasi relatif dari industri produksi Dalam perekonomian, komoditas tersebut memiliki arti yang relatif sama dengan industri dalam perekonomian nasional.

Location quotient (LQ) industri tersebut adalah. Jika location quotient (LQ) kurang dari 1 maka daerah tersebut akan mengimpor produk industri, sedangkan jika location quotient (LQ) lebih besar dari 1 maka daerah tersebut dianggap mampu mengekspor produk industri daerah tersebut. Location quotient (LQ) sebesar 1,5 ( $\frac{2}{3}$ ) berarti  $\frac{2}{3}$  dari pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi konsumsi di daerah tersebut, sedangkan sepertiganya dapat diekspor.

Karena cara penggunaan yang sederhana ini, maka tehnik analisa ini sering dipakai, terutama dalam tahap pemula dari suatu penelitian. Umpamanya, untuk mengadakan analisa tentang ekspor dan impor suatu daerah. Tetapi penggunaan *Location Quotient* (LQ) ada kelemahan-kelemahannya, diantaranya ialah bahwa; (1) Preferensi dan pola pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. (3) Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap daerah. Umpamanya, di daerah A konsumsi bahan pakaian rata-rata lebih tinggi dari daerah B. Dalam hal ini maka industri bahan pakaian di daerah A dapat mempunyai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu, tetapi daerah ini mengimpor hasil produksinya, sedangkan dilain pihak, di daerah B industri tersebut mempunyai *Location Quotient* (LQ) kurang dari satu, tetapi daerah B mengekspor hasil produksinya. (4) Keperluan-keperluan untuk produksi, dan juga produktivitas buruh berbeda diantara daerah. Umpamanya, industri pertenunan di daerah A rata-rata lebih memakai benang tenun kapas, sedangkan di daerah B lebih banyak dipakai benang tenun sintesis. Dalam hal ini maka industri permintaan kapas di daerah A dapat mempunyai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu, tetapi daerah itu mengimpor benang tenun dari daerah B, di mana industri permintaan kapasnya.

## Method

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Banggai digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Banggai yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sector yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Nilai LQ diperoleh dengan menggunakan metode yang mengacu pada rumus yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004:183).

$$LQ = \frac{PDRBBgg,i / \sum PDRBBgg}{PDRBST,i / \sum PDRBST}$$

Keterangan :

PDRBBgg,I = PDRB sektor I pada tahun tertentu  
 $\sum$ PDRBBgg = Total PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun Tertentu  
 PDRBST,I = PDRB sektor i di Profinsi Sulawesi Tengah pada tahun tertentu  
 $\sum$ PDRBST = Total PDRB di Profinsi Sulawesi Tengah pada tahun tertentu

Menurut rumus yang ditunjukkan di atas, tiga kemungkinan nilai LQ dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro 2004: 183), yaitu; (1) Nilai LQ = 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kabupaten Banggai sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Nilai LQ > 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kabupaten Banggai lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Sulawesi Tengah. (3) Nilai LQ < 1. Artinya tingkat spesialisasi sektor i di wilayah Kabupaten Banggai lebih rendah dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Jika LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan sektor primer dan memiliki potensi pertumbuhan sebagai mesin penggerak perekonomian Kabupaten Banggai. Sebaliknya, jika LQ < 1, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis.

## Hasil dan Pembahasan

LQ membandingkan besarnya peran instansi di Kabupaten Banggai dengan besarnya peran instansi di Sulawesi Tengah. LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor dalam perekonomian khususnya PDRB yang dapat dibedakan menjadi sektor primer dan non primer.t

Nilai LQ tersebut menjadi pedoman dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi tumbuh. Sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah tertentu, tetapi juga memenuhi kebutuhan daerah lain, serta mengekspor ke daerah lain atau mengalami surplus.

**Tabel 1.** Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Banggai Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata LQ
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.14	0.97	0.77	0.77	0.76	0.88
Pertambangan dan Penggalian	0.71	1.30	1.79	1.75	1.75	1.46
Industri Pengolahan	1.88	1.97	2.15	2.08	2.04	2.03
Pengadaan Listrik dan Gas	0.63	0.55	0.44	0.43	0.44	0.50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.62	0.56	0.47	0.48	0.47	0.52
Konstruksi	0.96	0.75	0.62	0.64	0.64	0.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.71	0.65	0.52	0.52	0.52	0.58
Transportasi dan Pergudangan	1.03	0.91	0.73	0.73	0.71	0.82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.88	0.78	0.63	0.63	0.67	0.72
Informasi dan Komunikasi	0.82	0.78	0.61	0.61	0.62	0.69
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.02	0.92	0.68	0.70	0.70	0.80
Real Estate	1.16	1.02	0.82	0.80	0.81	0.92
Jasa Perusahaan	0.42	0.39	0.33	0.36	0.36	0.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0.72	0.64	0.50	0.49	0.48	0.57
Jasa Pendidikan	0.91	0.80	0.64	0.64	0.63	0.72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.55	0.05	0.46	0.43	0.42
Jasa Lainnya	0.75	0.64	0.52	0.52	0.52	0.59

Sumber: Data diolah

Nilai LQ > 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor pertama yang artinya sektor tersebut memiliki peranan yang lebih tinggi di Kabupaten Banggai dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai memiliki surplus pada sektor produknya. Sebaliknya jika LQ < 1 berarti sektor tersebut merupakan sektor non-primer, berarti peranan sektor tersebut di Kabupaten Banggai lebih kecil dibandingkan peranannya di tingkat Sulawesi Tengah.

### Analisis *Location Quotient*

Berdasarkan Faktor Lokalisasi (LQ) PDRB Kabupaten Banggai periode pengamatan 2014-2018, yang dihitung pada Tabel 1, dapat diidentifikasi sektor-sektor kunci dan tidak signifikan. Industri pertambangan dan ekstraktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Banggai, menjadikan sektor ini sebagai sektor primer. Rata-rata LQ untuk sektor pertambangan dan penggalian adalah 1,46. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut bekerja dengan baik, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai cukup besar.

Industri pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Banggai sebesar 19,49%. Antara tahun 2014 dan 2018, nilai tambah nominal yang diberikan secara konsisten meningkat dari Rp 624.291,00 pada tahun 2014 menjadi Rp 4.759.593,00. Peran sektor juga meningkat selama periode ini. Pada tahun 2018, kategori ini merupakan kontributor tertinggi kedua dibandingkan unit bisnis lainnya. Pengembangan sektor pertambangan dan penggalian serta subsektornya sebagai penggerak perekonomian daerah memerlukan peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan departemen atau sub departemen terkemuka di Kabupaten Banggai sangat diperlukan. Peran pemerintah daerah terutama dalam proses pertukaran barang atau ekspor antar daerah untuk mendorong pendapatan dari luar daerah masuk ke wilayah Kabupaten Banggai.

Sesuai dengan persyaratan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengembangan sektor pertambangan ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, menyeimbangkan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor dan mendukung pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Sektor pertambangan dan penggalian skala besar dapat menyerap tenaga kerja. Sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor dasar perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB di Kabupaten Banggai.

Industri non-esensial meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan, manufaktur, pasokan listrik dan gas alam, pasokan air, pengelolaan limbah, limbah dan daur ulang, konstruksi, grosir dan eceran; pemeliharaan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan penyimpanan, akomodasi dan katering, industri informasi dan komunikasi, industri keuangan dan asuransi, industri real estate, industri jasa perusahaan, industri manajemen pemerintahan, industri pertahanan negara dan jaminan sosial wajib, industri pendidikan, kesehatan dan kegiatan dll .dan layanan sosial.

Meskipun sektor inti merupakan sektor dengan potensi pembangunan yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai, namun peran sektor non inti tidak dapat diabaikan. Sebab, kehadiran industri primer justru akan membantu industri non-inti berekspansi menjadi industri primer baru.

## Simpulan

Hasil analisis Location Question (LQ) pengamatan PDRB periode 2014-2018 di Kabupaten Banggai untuk mengidentifikasi sektor inti dan non-inti. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Banggai, sehingga menjadikan sektor ini sebagai sektor pondasi. Rata-rata LQ untuk pertambangan dan penggalian adalah 1,46. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut berfungsi dengan baik sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai.

## Referensi

- Basmar, E., Sartika, S. H., Suleman, A. R., Faried, A. I., Damanik, D., Amruddin, A., ... & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kebijakan Daerah 2021 (Vol. 1)*. umsu press.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., Siregar, R. T., Purba, S., ... & Weya, I. (2021). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan*. Jakarta:LPFE-UI.
- Kurniasih, C. U. (2021). Konsentrasi spasial dan spesialisasi sektor ekonomi wilayah. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 96-102
- Prasetya, P., & Prasetyaningtyas, S. (2021). *Metode Riset Bisnis: Structural Equation Modeling Soft System Methodology*. PT Penerbit IPB Press.
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375-391..
- Purwanto, A., Asbari, M., & Santoso, T. I. (2021). Analisis Data Penelitian Sosial dan Manajemen: Perbandingan Hasil antara Amos, SmartPLS, WarpPLS, dan SPSS Untuk Jumlah Sampel Medium. *International Journal of Social and Management Studies*, 2(4), 43-53.
- Puspita, V. (2022). Strategi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Kota Palangka Raya Berbasis Sektor Ekonomi Unggulan. *Ecoplan*, 5(1), 87-95.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- 
- Septiani, I. Y., & Endang, E. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020. *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 5(1), 25-31.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Badouse Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Yusuf, M., Wahyu, W., Anwar, A., & Alam, S. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Pola Ruang. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 71-80.